

Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Kepadatan Penduduk, dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022

Dyah Mustikaningrum¹⁾, Yuni Prihadi Utomo²⁾
Universitas Muhammadiyah Surakarta^{1,2}
b300200295@student.ums.ac.id¹⁾, yp196@ums.ac.id²⁾

ABSTRACT

Poverty is a common global issue, especially in developing countries like Indonesia. This study aims to evaluate the impact of Economic Growth, Gini Ratio, Unemployment Rate, Human Development Index (HDI), Population Density, and Regional Fiscal Independence Level on poverty levels in West Java Province. The method used is panel data regression analysis, which combines time series data from 2017 to 2022 and cross-section data from 28 districts/cities in the province. Based on the results of the analysis, the best model chosen is the Fixed Effect Model (FEM). The research findings show that the Gini Ratio, Unemployment, and Regional Financial Independence have a significant effect on poverty. Income inequality and high unemployment rates are known to worsen poverty conditions, while the ability of regions to manage their own finances actually contributes to reducing poverty rates. On the other hand, variables such as Economic Growth, HDI, and Population Density do not have a significant effect on poverty during the observation period. These findings underline the importance of efforts to equalize income, create jobs, and increase fiscal independence in reducing poverty rates in West Java.

Keywords: *Poverty, Economic Growth, Gini Ratio, Unemployment, Human Development Index, Population Density, and Regional Financial Independence.*

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan isu global yang umum terjadi, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini, Tingkat Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kepadatan Penduduk, serta Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel, yang menggabungkan data time series dari tahun 2017 hingga 2022 serta data cross section dari 28 kabupaten/kota di provinsi tersebut. Berdasarkan hasil analisis, model terbaik yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Rasio Gini, Pengangguran, dan Kemandirian Keuangan Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Ketimpangan pendapatan dan tingginya angka pengangguran diketahui memperburuk kondisi kemiskinan, sedangkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya sendiri justru berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan. Di sisi lain, variabel seperti Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Kepadatan Penduduk tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap kemiskinan selama periode observasi. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya upaya pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kemandirian fiskal dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Jawa Barat.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Kepadatan Penduduk, dan Kemandirian Keuangan Daerah.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan global, terutama di negara-negara berkembang, yang muncul akibat interaksi kompleks berbagai faktor seperti tingkat pendapatan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap layanan dasar, letak geografis, gender, dan kondisi lingkungan (Kevin et al., 2022). Dalam konteks ekonomi, kemiskinan mencerminkan rendahnya kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, ditandai oleh minimnya aset, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas dan pendapatan, serta terbatasnya partisipasi dalam pembangunan (Sayifullah & Gandasari, 2016).

Menurut BPS, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur berdasarkan garis kemiskinan. Garis ini dibagi menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan non-makanan (GKNM). Tingginya tingkat kemiskinan berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi karena menambah beban anggaran dan memperlambat pertumbuhan. Oleh sebab itu, pemerintah dituntut untuk merancang kebijakan yang efektif dalam menangani masalah ini (Mirza, 2012).

Indonesia sebagai negara berkembang masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan yang tersebar di berbagai daerah. Per September 2022, jumlah penduduk miskin mencapai 26,36 juta jiwa, dengan 13,94 juta di antaranya berada di Pulau Jawa. Di Provinsi Jawa Barat sendiri, angka kemiskinan tercatat sebesar 8,06% pada tahun yang sama. Padahal, provinsi ini dikenal memiliki populasi besar serta kekayaan sumber daya alam yang seharusnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Namun, realitanya, sebagian masyarakat di provinsi ini masih hidup di bawah garis kemiskinan. Grafik 1 menyajikan perkembangan jumlah penduduk miskin (dalam ribu jiwa) dan persentase tingkat kemiskinan di Jawa Barat sepanjang 2017 hingga 2022.



Gambar 1. Grafik Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) dan Tingkat Kemiskinan (persen) di Jawa Barat Tahun 2017-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam Grafik 1, jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat mengalami tren menurun dari tahun 2017 hingga 2019, yakni dari 4.168,40 ribu jiwa menjadi 3.399,20 ribu jiwa, atau berkurang sebanyak 769,20 ribu jiwa. Namun, pada periode 2020–2021, terjadi lonjakan angka kemiskinan dari 3.920,20 ribu jiwa menjadi 4.195,30 ribu jiwa (naik 796,10 ribu jiwa), yang kemungkinan besar dipicu oleh pandemi COVID-19. Pada tahun 2022, jumlah tersebut kembali turun menjadi 4.071,00 ribu jiwa, atau berkurang sebesar 124,30 ribu jiwa. Di antara wilayah tersebut, Kota Bogor mencatat jumlah penduduk miskin tertinggi pada 2017 dengan 487,3 ribu jiwa, menurun menjadi 474,7 ribu jiwa di tahun 2022. Sebaliknya, jumlah terendah ditemukan di Kota Banjar, dari 12,9 ribu jiwa pada 2017 menjadi 12,7 ribu jiwa pada 2022.

Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan di Jawa Barat menunjukkan penurunan sebesar 1,80% selama 2017–2019, kemudian mengalami kenaikan sebesar 1,49% selama 2020–2021, sebelum kembali turun sebesar 0,34% pada 2022. Kota Tasikmalaya dan Kota Depok mencatat persentase kemiskinan tertinggi dan terendah selama periode 2017–2021, yaitu masing-masing sebesar 13,13% dan 2,58%. Namun, pada tahun 2022, Kabupaten Indramayu menempati posisi tertinggi dengan tingkat kemiskinan sebesar 12,77%.

Kenaikan tingkat kemiskinan selama 2019–2021 disinyalir sebagai dampak langsung dari pandemi, yang mengganggu aktivitas ekonomi, khususnya di sektor informal yang bergantung pada penghasilan harian. Hal ini memperburuk kondisi perekonomian dan memperbesar jumlah masyarakat miskin, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Namun, sejak tahun 2022, aktivitas ekonomi perlahan membaik dan angka kemiskinan mulai menurun kembali. Secara umum, kemiskinan di Indonesia

dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti pendapatan, pengangguran, tingkat pendidikan, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan (Putra & Arka, 2018).

Sharp et al. (1996) menyoroti akar kemiskinan dari sisi ekonomi. Pertama, ketimpangan distribusi sumber daya menjadi penyebab utama kemiskinan di tingkat mikro, karena mereka yang miskin cenderung memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia turut menyebabkan produktivitas dan pendapatan yang rendah, yang umumnya disebabkan oleh kurangnya pendidikan, diskriminasi, kondisi nasib, atau faktor keturunan. Ketiga, akses terhadap modal yang terbatas juga memperparah kondisi kemiskinan (Kadji, 2012).

Teori *Vicious Circle of Poverty* yang dikenalkan oleh Ragnar Nurkse (1953) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan akibat dari siklus negatif yang saling memperkuat: rendahnya produktivitas menyebabkan pendapatan rendah, yang berdampak pada minimnya tabungan dan investasi, serta lemahnya pembentukan modal dan penciptaan lapangan kerja. Situasi ini banyak dialami oleh negara berkembang yang menghadapi kendala besar dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakatnya (Kadji, 2012).

Sementara itu, teori marginalisasi menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh mekanisme sosial yang mengisolasi kelompok-kelompok tertentu dari akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan berbagai sumber daya penting (Kadji, 2012).

Pendekatan neo-liberal memandang kemiskinan sebagai hasil dari pilihan individu, dengan mengedepankan mekanisme pasar bebas sebagai solusi utama. Dalam perspektif ini, kebebasan individu adalah faktor penting, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diyakini dapat menghapus kemiskinan (Febriana, 2010). Sebaliknya, paradigma demokrasi-sosial melihat kemiskinan sebagai akibat dari struktur sosial yang tidak adil dan ketimpangan akses antarkelompok dalam masyarakat. Meskipun kritis terhadap sistem pasar bebas, pendekatan ini masih mengakui kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang paling efisien (Febriana, 2010).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, rasio gini, tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia (IPM), kepadatan penduduk, dan tingkat kemandirian fiskal daerah terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat selama periode 2017–2022.

TINJAUAN LITERATUR

Berbagai studi telah mengkaji determinan kemiskinan dengan pendekatan regresi data panel, khususnya menggunakan Fixed Effect Model (FEM). Hasilnya menunjukkan variabilitas pengaruh dari indikator-indikator makroekonomi. Studi oleh Indrawati et al. (2020) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan ($\rho < 0,05$), sedangkan ketimpangan pendapatan tidak menunjukkan hubungan signifikan. Sementara itu, Andykha et al. (2018) mengidentifikasi bahwa IPM dan pengangguran terbuka secara

signifikan mempengaruhi kemiskinan, namun PDRB tidak menunjukkan pengaruh berarti ($\rho > 0,1$).

Penelitian oleh Endrawati et al. (2023) menyimpulkan bahwa rasio gini dan IPM berkontribusi signifikan terhadap kemiskinan ($\rho < 0,01$), sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh. Serupa dengan itu, Kusuma & Zakiyyah (2024) mengungkap bahwa seluruh variabel yang diuji—pertumbuhan ekonomi, IPM, TPT, dan ketimpangan pendapatan berpengaruh secara statistik terhadap kemiskinan ($\rho < 0,1$). Dalam studi lain, Azizah & Asiyah (2022) menemukan bahwa jumlah penduduk, IPM, dan pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan PDRB tidak. Safitri et al. (2020) menunjukkan bahwa subsidi pemerintah dan PDRB berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan, namun IPM tidak berpengaruh.

Temuan dari Maulana & Julia (2019) menekankan pentingnya rasio gini dan jumlah penduduk sebagai faktor yang signifikan, sedangkan indeks pendidikan dan pendapatan per kapita tidak menunjukkan hubungan berarti. Dalam pendekatan berbeda, Riskiyani & Nasir (2021) dengan model REM menyatakan bahwa kemandirian fiskal daerah signifikan dalam menekan kemiskinan, tetapi pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh. Penelitian oleh Malik & Utomo (2024) menunjukkan bahwa jumlah rumah sakit, PDRB, IPM, dan jumlah penduduk bekerja berpengaruh terhadap kemiskinan, sementara TPAK, PAD, dan RLS tidak. Pola hubungan menggunakan pendekatan linear-log. Studi oleh Santoso & Setyowati (2023) juga menggunakan pendekatan serupa dan menunjukkan bahwa PDRB dan pengangguran memiliki pengaruh signifikan, sedangkan RLS, jumlah penduduk, dan AHH tidak.

Dalam lingkup yang lebih luas, Nahor & Anggraini (2024) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, inflasi, dan IPM signifikan memengaruhi kemiskinan, sedangkan investasi domestik tidak.

METODE PENELITIAN

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan model ekonometrik sebagai berikut:

$$POV_{it} = \beta_0 + \beta_1 GROWTH_{it} + \beta_2 GINI_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \beta_4 UNEMP_{it} + \beta_5 KP_{it} + \beta_6 KKD_{it} + \varepsilon_{it}$$

di mana:

<i>POV</i>	= Kemiskinan (%)
<i>GROWTH</i>	= Pertumbuhan Ekonomi (%)
<i>GINI</i>	= Rasio Gini
<i>IPM</i>	= Indeks Pembangunan Manusia (%)
<i>UNEMP</i>	= Pengangguran (%)
<i>KP</i>	= Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
<i>KKD</i>	= Kemandirian Keuangan Daerah (%)
ε	= <i>Error term</i> (faktor kesalahan)
β_0	= Konstanta
$\beta_1 \dots \beta_6$	= Koefisien regresi variabel independen
<i>i</i>	= Entitas ke-i

t = tahun ke- t

Model ekonometrik dalam penelitian ini merupakan hasil adaptasi dari beberapa studi terdahulu, yaitu Azizah & Asiyah (2022) yang melibatkan variabel Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Endrawati et al. (2023) dengan variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini, Rohmah et al. (2024) dengan variabel Kepadatan Penduduk, serta Riskiyani & Nasir (2021) yang menyoroti Kemandirian Keuangan Daerah. Variabel Pengangguran (UNEMP), Rasio Gini (GINI), dan Kepadatan Penduduk (KP) diasumsikan berdampak positif terhadap tingkat kemiskinan (POV), sementara Pertumbuhan Ekonomi (GROWTH), IPM, dan Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) diperkirakan memberikan pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Penelitian ini memanfaatkan data panel yang mengombinasikan deret waktu tahun 2017–2022 dan data lintas wilayah dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis regresi dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM), dengan penentuan model terbaik melalui pengujian Chow, Hausman, dan bila dibutuhkan, Lagrange Multiplier. Setelah model terbaik diperoleh, tahap selanjutnya adalah menguji kelayakan model serta signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Estimasi

Hasil estimasi model ekonometrik di muka dengan pendekatan *Pooled Least Square (PLS)*, *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)* beserta hasil uji pemilihan modelnya terangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Estimasi Model Ekonometrik Regresi Data Panel - Cross section

Variabel	Koefisien Regresi		
	PLS	FEM	REM
C	33,92308	9,335278	21,46233
GROWTH	-0,062574	-0,014723	-0,046960
GINI	11,64155	4,278127	4,832372
IPM	-0,386718	0,000874	-0,070202
UNEMP	0,088612	0,064434	0,009340
LOG(KP)	-0,326250	-0,446578	-1,321222
KKD	-0,012142	0,014103	0,015740
R2	0,772859	0,989252	0,158346
Adjusted. R2	0,764395	0,986606	0,126980
Statistik F	91,30205	373,7549	5,048348
Prob. Statistik F	0,000000	0,000000	0,000090

Uji Pemilihan Model

Chow

Cross- Section $F(27,134) = 62,620794$; Prob. $F(27,134) = 0,0000$

Hausman

Cross-Section random $\chi^2 (6) = 23,903759$; Prob. $\chi^2 = 0,0005$

Sumber: BPS, diolah.

Pengujian Chow dan Hausman menunjukkan bahwa model Fixed Effect (FEM) merupakan model paling tepat untuk dianalisis. Hal ini dibuktikan dari nilai probabilitas statistik F dan statistik χ^2 yang masing-masing sebesar 0,0000 dan 0,0005, keduanya berada di bawah ambang signifikansi 0,01. Estimasi lengkap dari model FEM ini dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2. Model Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

$POV_{it} = 9,335278 - 0,014723GROWTH_{it} + 4,278127GINI_{it}$
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> (0,3644) (0,0017)* </div>
$+ 0,000874IPM_{it} + 0,064434UNEMP_{it} - 0,446578logKP_{it} + 0,014103KKD_{it}$
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> (0,9794) (0,0921)*** (0,5495) (0,0768)*** </div>
R2 = 0,989252; DW = 1,685484; F. = 373,7549; Prob. F = 0,000000

Sumber: BPS, diolah. Keterangan: *Signifikan pada $\alpha = 0,01$; **Signifikan pada $\alpha = 0,05$; ***Signifikan pada $\alpha = 0,10$; Angka di dalam kurung adalah probabilitas nilai statistik t.

Tabel 3. Efek dan Konstanta Wilayah

No	Kabupaten/Kota	Efek Wilayah	Konstanta
1.	Bogor	-1,236255	8,099023
2.	Sukabumi	-1,450454	7,884824
3.	Cianjur	1,589035	10,924313
4.	Bandung	-1,456702	7,878576
5.	Garut	1,600667	10,935945
6.	Tasikmalaya	1,855746	11,191024
7.	Ciamis	-0,655517	8,679761
8.	Kuningan	3,917489	13,252767
9.	Cirebon	3,221819	12,557097
10.	Majalengka	3,240153	12,575431
11.	Sumedang	1,316180	10,651458
12.	Indramayu	4,136019	13,471297
13.	Subang	0,815870	10,151148
14.	Purwakarta	-0,403094	8,932184
15.	Karawang	-0,121670	9,213608
16.	Bekasi	-3,929372	5,405906
17.	Bandung Barat	1,805085	11,140363
18.	Pangandaran	0,357435	9,692713
19.	Kota Bogor	-1,425032	7,910246

20.	Kota Sukabumi	-0,505330	8,829948
21.	Kota Bandung	-3,914152	5,421126
22.	Kota Cirebon	1,158694	10,493972
23.	Kota Bekasi	-3,586969	5,748309
24.	Kota Depok	-5,486870	3,848408
25.	Kota Cimahi	-2,661597	6,673681
26.	Kota Tasikmalaya	4,859848	14,195126
27.	Kota Banjar	-1,697474	7,637804
28.	Provinsi Jawa Barat	-1,343546	7,991732

Sumber: BPS, Diolah

Berdasarkan Tabel 2, model Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan tingkat signifikansi statistik F sebesar 0,0000, yang berada di bawah ambang batas 0,01. Hal ini menandakan bahwa model FEM yang digunakan dalam penelitian ini signifikan secara statistik. Koefisien determinasi (R^2) tercatat sebesar 0,989252, yang mengindikasikan bahwa model ini memiliki kemampuan prediktif yang sangat tinggi terhadap variabel dependen. Dari enam variabel independen yang dianalisis dalam model ekonometrik, terdapat tiga variabel yang secara signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan, yaitu Rasio Gini (GINI), tingkat pengangguran (UNEMP), dan tingkat kemandirian keuangan daerah (KKD), dengan nilai signifikansi t-statistik masing-masing sebesar 0,0017 ($< 0,01$), 0,0921 ($< 0,1$), dan 0,0768 ($< 0,1$). Sebaliknya, variabel pertumbuhan ekonomi (GROWTH), indeks pembangunan manusia (IPM), dan kepadatan penduduk (KP) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan, dengan nilai signifikansi t berturut-turut sebesar 0,3644, 0,9794, dan 0,5495 (seluruhnya $> 0,1$).

Variabel Rasio Gini memiliki koefisien regresi sebesar 4,278127, yang menunjukkan hubungan linier positif. Artinya, setiap peningkatan 1 poin pada Rasio Gini diperkirakan akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 4,278127%. Sebaliknya, penurunan Rasio Gini sebesar 1 poin akan menurunkan tingkat kemiskinan dalam proporsi yang sama. Sementara itu, variabel tingkat pengangguran memiliki koefisien regresi 0,064434, juga dengan hubungan linier positif, sehingga peningkatan angka pengangguran sebesar 1% berpotensi menaikkan angka kemiskinan sebesar 0,064434%. Penurunan tingkat pengangguran diperkirakan memberikan dampak penurunan kemiskinan dalam besaran yang sama.

Kemandirian keuangan daerah juga menunjukkan pengaruh yang searah dengan kemiskinan, dengan koefisien regresi sebesar 0,014103. Artinya, setiap kenaikan 1% dalam kemandirian keuangan daerah dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan sebesar 0,014103%. Sebaliknya, penurunan pada variabel ini diperkirakan menurunkan angka kemiskinan dengan besaran yang identik.

Merujuk pada Tabel 3, Kota Tasikmalaya tercatat memiliki nilai konstanta tertinggi, yakni 14,195126. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah ini cenderung mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat, apabila dipertimbangkan berdasarkan pengaruh dari variabel-variabel seperti pertumbuhan ekonomi, Rasio Gini, pengangguran, IPM, kepadatan

penduduk, dan kemandirian keuangan daerah. Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu menyusul dengan nilai konstanta yang juga tinggi.

Di sisi lain, Kota Depok menunjukkan nilai konstanta terendah, yaitu sebesar 3,848408. Ini mengindikasikan bahwa dengan variabel-variabel yang sama, Kota Depok memiliki kecenderungan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya di provinsi yang sama. Selanjutnya, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi juga termasuk daerah dengan nilai konstanta yang rendah, mencerminkan kecenderungan tingkat kemiskinan yang relatif kecil.

Interpretasi Ekonomi

Selama kurun waktu 2017 hingga 2022, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi secara signifikan oleh Rasio Gini (GINI), tingkat pengangguran (UNEMP), serta tingkat kemandirian keuangan daerah (KKD). Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi (GROWTH), indeks pembangunan manusia (IPM), dan kepadatan penduduk (KP) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap perubahan tingkat kemiskinan dalam periode tersebut.

Pertumbuhan ekonomi (GROWTH) ternyata tidak berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan di Jawa Barat selama 2017–2022. Hal ini dapat dijelaskan melalui struktur ekonomi daerah yang didominasi oleh sektor industri pengolahan dan jasa padat modal, yang cenderung tidak menyerap tenaga kerja berkemampuan rendah secara maksimal. Akibatnya, kelompok masyarakat miskin yang bergantung pada sektor informal seperti pertanian dan usaha mikro sulit memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut. Faktor-faktor struktural seperti ketimpangan distribusi pendapatan, lonjakan harga kebutuhan pokok yang menekan daya beli, serta tingkat pengangguran yang masih tinggi memperlemah kontribusi pertumbuhan terhadap pengurangan kemiskinan. Selain itu, belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam menyalurkan manfaat pertumbuhan ekonomi turut menjadi kendala. Oleh karena itu, perlu strategi pembangunan yang lebih inklusif, seperti pelatihan keterampilan untuk pekerja informal, kebijakan fiskal yang mendukung kelompok rentan, dan pengendalian harga bahan pokok agar manfaat pertumbuhan menjangkau semua lapisan masyarakat. Hasil ini konsisten dengan temuan Putri & Yuliana (2023), namun bertentangan dengan studi Kusuma & Zakiyyah (2024) yang menemukan adanya hubungan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.

Rasio Gini (GINI) memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, semakin tinggi ketimpangan pendapatan, semakin besar kemungkinan peningkatan angka kemiskinan. Ketika Rasio Gini menurun, distribusi pendapatan menjadi lebih merata, yang secara langsung berkontribusi pada penurunan jumlah penduduk miskin. Data dari BPS menunjukkan fluktuasi rasio Gini di Jawa Barat, namun kecenderungan penurunan di tahun-tahun tertentu seperti 2019 dan 2020 menunjukkan adanya langkah menuju pemerataan. Wilayah dengan infrastruktur dan akses ekonomi yang baik seperti Bogor dan Bekasi cenderung memiliki ketimpangan lebih rendah, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Rival et al. (2022).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa meskipun IPM mengalami peningkatan, belum tentu diiringi dengan terbukanya peluang ekonomi bagi masyarakat miskin. Peningkatan dalam sektor pendidikan dan kesehatan tidak menjamin ketersediaan pekerjaan layak, terutama bagi mereka yang berpendidikan rendah atau tidak memiliki keterampilan khusus. Faktor-faktor seperti ketimpangan ekonomi, upah rendah, serta terbatasnya akses terhadap pasar kerja bagi kelompok miskin membuat IPM tidak mampu secara langsung mengurangi kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan Faadihilah & Primadha (2023), namun berbeda dengan studi Andykha et al. (2018) yang menemukan adanya pengaruh signifikan dari IPM terhadap kemiskinan.

Pengangguran (UNEMP) terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan, yang artinya peningkatan angka pengangguran berkorelasi dengan peningkatan jumlah masyarakat miskin. Namun demikian, peningkatan pengangguran juga mendorong pemerintah untuk lebih aktif dalam merancang program pelatihan dan bantuan sosial guna mengatasi masalah ini. Contohnya, saat pandemi COVID-19, pemerintah meluncurkan pelatihan kerja dan stimulus sosial untuk mengantisipasi lonjakan pengangguran. Langkah-langkah ini membantu menciptakan peluang kerja baru dan mendukung masyarakat terdampak dalam beradaptasi. Selain itu, fenomena meningkatnya kewirausahaan akibat kehilangan pekerjaan juga menjadi pendorong terciptanya lapangan kerja baru. Hasil ini selaras dengan penelitian Ishak et al. (2020), meskipun berbeda pandangan dengan studi Suryaningrum et al. (2021) yang tidak menemukan pengaruh signifikan antara pengangguran dan kemiskinan.

Kepadatan penduduk (KP) tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat selama periode kajian. Ini mengindikasikan bahwa tingginya jumlah penduduk tidak selalu identik dengan tingginya kemiskinan, asalkan tersedia lapangan pekerjaan yang mencukupi dan merata. Daerah dengan kepadatan tinggi namun memiliki akses yang baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur ekonomi tetap dapat menjaga tingkat kemiskinan pada level rendah. Oleh karena itu, distribusi kesempatan ekonomi dan sumber daya menjadi faktor kunci yang lebih dominan daripada jumlah penduduk itu sendiri. Temuan ini didukung oleh hasil studi Rohmah et al. (2024) yang menyatakan bahwa kepadatan penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) berkontribusi positif terhadap penurunan kemiskinan di Jawa Barat. Kemandirian fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang program pembangunan secara mandiri dan responsif terhadap kebutuhan lokal tanpa ketergantungan pada dana pusat. Pendapatan asli daerah yang tinggi memungkinkan pengalokasian anggaran yang lebih besar bagi sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur sosial yang mendukung masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan kemampuan fiskal yang memadai, pemerintah daerah dapat memberdayakan masyarakat dan mempercepat penurunan angka kemiskinan. Hasil ini mendukung temuan dari Riskiyani & Nasir

(2021) yang juga menunjukkan bahwa kemandirian keuangan memiliki dampak terhadap penurunan kemiskinan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Fixed Effect Model (FEM) dipilih sebagai model terestimasi terbaik dengan R² sebesar 0,989252. Secara parsial, Rasio Gini (GINI), Pengangguran (UNEMP), dan Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat periode 2017-2022, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi (GROWTH), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Kepadatan Penduduk (KP) tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kota Tasikmalaya, dan terendah di Kota Depok.

Kemiskinan di Jawa Barat selama periode tersebut dipengaruhi oleh Rasio Gini, pengangguran, dan kemandirian keuangan daerah. Ketimpangan pendapatan dan tingginya pengangguran, terutama pasca-pandemi, memperburuk kondisi ekonomi masyarakat miskin, menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus tanpa kebijakan yang efektif. Program pelatihan kerja dan bantuan sosial telah diupayakan, namun dampaknya belum cukup signifikan. Kemandirian keuangan daerah berperan penting dalam pengentasan kemiskinan, memungkinkan pendanaan program-program sosial secara mandiri.

Sementara itu, faktor-faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, IPM, dan kepadatan penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Meskipun terdapat peningkatan IPM, kesempatan kerja bagi masyarakat miskin tetap terbatas karena ketergantungan pada sektor industri yang tidak menyerap tenaga kerja tidak terampil.

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pemerintah Jawa Barat meningkatkan kemandirian keuangan daerah, fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta memperhatikan distribusi sumber daya dan kesempatan ekonomi yang lebih merata. Pemerintah juga perlu mengembangkan strategi pembangunan yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, S. (2024). Analysis of Factors Influencing Poverty Levels in Aceh Province. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 1(2), 88-104. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22219/jie.v8i04.34151>
- Alsya, V. D., Triwahyuningtyas, N., & Murtatik, S. (2021). Analysis of Factors Affecting Poverty Level In Java Island. *International Journal of Social Service and Research*, 1(2), 150-161. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v1i2.29>
- Andykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(2), 113-123. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24856/mem.v33i2.671>

- Azizah, A. N., & Asiyah, B. N. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2697–2718. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.420>
- Endrawati, D., Nujum, S., & Selong, A. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia 2017-2022. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 20144–20151. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/9453>
- Faadihilah, G. F., & Primadha, W. P. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bekasi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(5), 1794–1801. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1462>
- Febriana, E. (2010). *Strategi Untuk Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Petani Miskin di Perdesaan: Studi Kasus Pada Rumah Tangga Petani Miskin di Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi* [Universitas Indonesia]. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=131538>
- Indrawati, I., Sarfiah, S. N., & Destianingsih, R. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2014-2019. *Directory Journal of Eeconomic*, 2(4), 1068–1080. <https://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/article/view/1446>
- Isa, D. P., Arham, M. A., & Dai, S. I. (2019). Effects of Capital Expenditures, Development Index and Unemployment on Poverty in Gorontalo Province. *Jambura Equilibrium Journal*, 1(1), 23–30. <https://doi.org/10.37479/jej.v1i1.1998>
- Ishak, R. A., Zakaria, J., & Arifin, M. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 41–53. <https://doi.org/10.33096/paradoks.v3i2.463>
- Kadji, Y. (2012). Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya. *Metallurgical and Materials Transactions A*, 30(8), 2221. <https://www.academia.edu/download/59240220/Kemiskinan-dan-Konsep-Teoritisnya20190513-87901-aw3t4l.pdf>
- Kevin, A. V., Bhinadi, A., & Syari'udin, A. (2022). Pengaruh PDBR, Angka Harapan Hidup, dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2021. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2959–2968. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.482>
- Kusuma, A. N., & Zakiyyah, N. A. A. (2024). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan di 38 Kabupaten / Kota Jawa Timur [Universitas Ahmad Dahlan].

In *Kapalamada: Jurnal Multidisipliner* (Vol. 2).
https://doi.org/10.22236/kapalamada_volX/isXppXX-XX

- Malik, M. H., & Utomo, Y. P. (2024). Analisis Determinan Kemiskinan di Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 10(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31869/me.v10i1.5720>
- Maulana, M. A., Julia, A., & Mafruhah, A. Y. (2022). Pengaruh Indeks Pendidikan, Gini Rasio, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Perkapita terhadap Tingkat Kemiskinan di Enam Provinsi Indonesia Tahun 2015-2019. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(1), 17-24.
<https://doi.org/10.29313/bcses.v2i1.300>
- Nahor, R. S. D. B., & Anggraini, E. D. (2024). Analysis of Factor Affecting Poverty in Indonesia. *Convergence: The Journal of Economic Development*, 6(1), 16-33.
<https://ejournal.unib.ac.id/convergence-jep/article/view/32904>
- Ningsih, Q. S., & Putri, N. T. (2023). Analysis of Factors Affecting Poverty in Eastern Indonesia. *Bicemba 1st Bengkulu International Conference on Economics, Management, Business and Accounting*, 18(2), 159.
<https://doi.org/10.35448/jte.v18i2.23203>
- Putri, R. H. N., & Yuliana, I. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Pengangguran Sebagai Mediasi di Probolinggo. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(6), 2691-2700.
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i6.2531>
- Riskiyani, A., & Nasir, M. (2021). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (JIM EKP) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Syiah Kuala*, 6(3), 173-182. <https://jim.usk.ac.id/EKP/article/view/20481>
- Rival, R., Hatta, M., & Suhardi, D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Gini Ratio Terhadap Kemiskinan Di Kota Parepare Tahun 2014-2023. *Cateris Paribus Journal Volume*, 4(1), 79-89.
<https://mail.umpar.ac.id/backupjurnal/index.php/cpj/article/view/3209>
- Rohmah, D. A. N., Subanti, S., & Susanti, Y. (2024). Analysis Of Factors Influencing The Poverty Rate In Central Java Province Using Panel Data Regression. *Icorhstech Proceeding of International Conference of Religion, Health, Education, Science and Technology*, 1(1), 274-283.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35316/icorhstech.v1i1.5645>
- Safitri, S. E., Triwahyuningtyas, N., & Sugianto. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 259-274. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.30>
- Safri, M. (2021). the Analysis Related To the Factors Which Affect the Poverty Levels of Districts/Cities in Jambi Province During 2014-2018. *Dinasti International*

Journal of Education Management And Social Science, 2(3), 451-462.
<https://doi.org/10.31933/dijemss.v2i3.757>

Santoso, A. B., & Setyowati, E. (2023). Analisis Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 21(2), 92-102. <https://doi.org/10.31253/pe.v21i2.1831>

Sayifullah, & Gandasari, T. R. (2016). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu (Jurnal Ilmu Ekonomi)*, 6(2), 236-255. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.35448/jequ.v6i2.4345>

Suryaningrum, O. A., Mulyanto, & Gravitiani, E. (2021). Analysis of Factors Affecting Poverty Levels: a Study of Central Java Province. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 5(12), 292-301. https://www.ijebmr.com/uploads/pdf/archivepdf/2021/IJEBMR_886.pdf